

Transformasi Pelayanan Kesehatan: Apa yang Berubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024?

Santika Ekanursita Amicitia, SKM, MKM
Perencana Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas



Pernahkah kita bertanya-tanya, bagaimana pemerintah memastikan layanan kesehatan yang kita terima memenuhi standar kualitas yang diharapkan? Ternyata, semua itu diatur dalam regulasi yang ketat, termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan. SPM ini wajib dipenuhi oleh setiap Pemerintah Daerah untuk menjamin bahwa kita dan semua warga negara mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

Tahun 2024 membawa perubahan penting dengan disahkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan dan menghadirkan pembaruan dalam cara kita mengevaluasi layanan kesehatan. Apa yang berubah? Mari kita gali lebih dalam!

1. Kenapa Peraturan Ini Harus Diubah?

Jika kita mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, jelas disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan Standar Pelayanan Minimal. Tapi, bukan hanya sekedar layanan, harus ada standar mutu dan kuantitas yang dipenuhi.

Nah, kenapa Peraturan Menteri Kesehatan lama diubah? Ini berkaitan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang memperkenalkan Indeks Pencapaian SPM (IP SPM). Singkatnya, indeks ini menilai seberapa baik daerah-daerah memenuhi standar pelayanan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas layanan yang diberikan. Dengan indeks ini, Pemerintah Daerah seperti Kabupaten Banyumas bisa mengetahui sejauh mana mereka berhasil melayani masyarakat.

2. Indeks Pencapaian SPM: Bagaimana Cara Kerjanya?

Bayangkan kita sedang mengukur kualitas makanan yang kita makan di sebuah restoran. Bukan hanya rasa yang dinilai, tapi juga ukuran porsi, kualitas bahan, dan pelayanan. Indeks Pencapaian SPM bekerja dengan cara yang hampir sama.

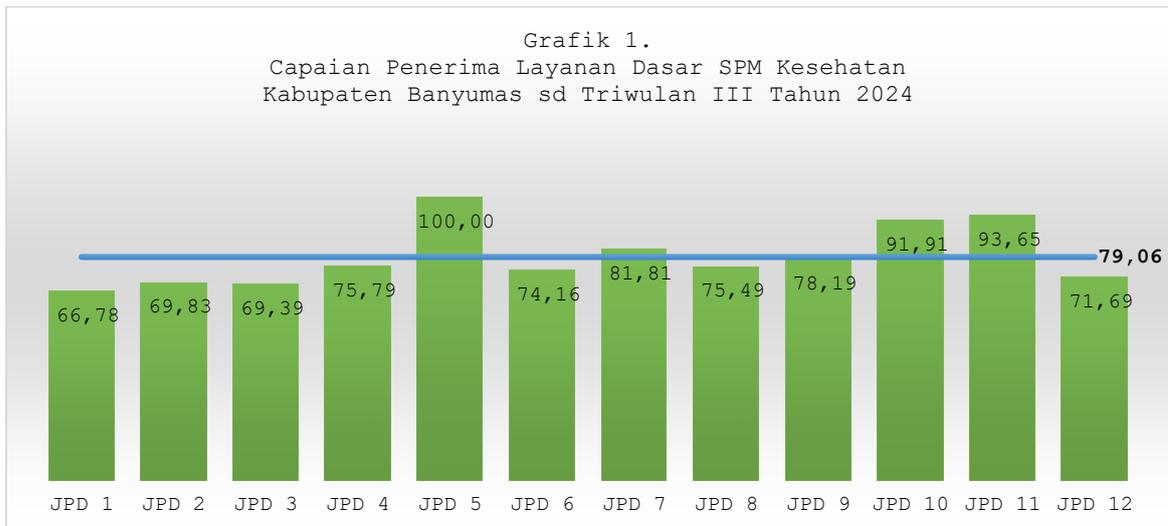
Indeks ini menggabungkan beberapa komponen:

- **Mutu barang/jasa:** Seperti alat kesehatan, obat-obatan, atau fasilitas medis, semua ini harus sesuai standar.
- **Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK):** Tenaga medis, seperti dokter, perawat, dan bidan, harus memiliki kompetensi yang sesuai.
- **Jumlah penerima layanan:** Seberapa banyak warga yang dilayani juga menjadi faktor penting.

Dengan cara ini, pemerintah bisa menilai apakah pelayanan kesehatan yang diberikan sudah cukup baik atau masih perlu diperbaiki.

3. Bagaimana Capaian SPM Kesehatan di Kabupaten Banyumas?

Sekarang kita fokus ke Kabupaten Banyumas. Bagaimana capaian SPM kesehatan (%) di Kabupaten Banyumas? Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas hingga Triwulan III Tahun 2024, ada beberapa capaian yang layak diapresiasi:



Sumber: Data Capaian SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2024

JPD 1	: pelayanan kesehatan ibu hamil
JPD 2	: pelayanan kesehatan ibu bersalin
JPD 3	: pelayanan kesehatan bayi baru lahir
JPD 4	: pelayanan kesehatan balita
JPD 5	: pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
JPD 6	: pelayanan kesehatan pada usia produktif
JPD 7	: pelayanan kesehatan pada usial lanjut
JPD 8	: pelayanan kesehatan penderita hipertensi
JPD 9	: pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
JPD 10	: pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
JPD 11	: pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
JPD 12	: pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau Human Immunodeficiency Virus

Berdasarkan data capaian penerima layanan dasar SPM Kesehatan di Kabupaten Banyumas hingga triwulan 3 Tahun 2024, rata-rata pencapaian 79,06%, dengan beberapa layanan menunjukkan hasil yang sangat baik, sementara lainnya memerlukan peningkatan.

- **Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak**
Layanan kesehatan ibu hamil (66,78%), ibu bersalin (69,83%), dan bayi baru lahir (69,39%) menunjukkan capaian rendah. Kualitas dan akses layanan harus ditingkatkan untuk memastikan penurunan angka kematian ibu dan bayi.
- **Layanan Kesehatan Anak Usia Sekolah**
Pelayanan kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar mencapai 100%, yang merupakan pencapaian sempurna. Ini menunjukkan bahwa program kesehatan bagi anak-anak sekolah telah berjalan efektif dan tepat sasaran.
- **Pelayanan Usia Produktif dan Lansia**
Layanan kesehatan untuk usia produktif (74,16%) dan lansia (81,81%) cukup baik, namun perlu peningkatan khususnya bagi usia produktif yang rentan terhadap penyakit akibat gaya hidup, seperti hipertensi dan diabetes.
- **Penyakit Menular dan Tidak Menular**
Layanan untuk penderita penyakit tidak menular seperti hipertensi (75,49%) dan diabetes (78,19%) sudah memadai, namun harus ditingkatkan untuk pencegahan komplikasi lebih lanjut. Layanan untuk penyakit menular seperti tuberkulosis (93,65%) dan gangguan jiwa berat (91,91%) sangat baik, mencerminkan efektivitas program penanganan.

Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam pencapaian SPM kesehatan, perlu fokus lebih pada layanan kesehatan ibu dan anak serta penyakit tidak menular untuk mencapai target yang lebih optimal.

4. Apa Arti Perubahan Ini untuk Kita?

Seiring terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, Pemerintah Daerah kini memiliki pedoman yang lebih jelas untuk memastikan mutu dan kuantitas pelayanan kesehatan. Bagi kita yang mungkin sedang mengakses layanan kesehatan di Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang kita dapatkan memenuhi standar kualitas yang layak.

Penting bagi kita untuk memahami bahwa layanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya soal fasilitas yang canggih, tetapi juga apakah tenaga medis yang melayani kita sudah memenuhi kompetensi yang dibutuhkan dan apakah kita mendapat akses pelayanan kesehatan yang sesuai.

5. Tantangan dan Harapan ke Depan

Meski ada kemajuan, tentu masih ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan pemerataan akses layanan kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat yang lebih rentan seperti masyarakat miskin dan lanjut usia, serta populasi kunci sasaran SPM pelayanan kesehatan.

Namun, dengan regulasi yang diperbarui dan Indeks Pencapaian SPM, Pemerintah Daerah memiliki alat yang lebih baik untuk mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan. Kita semua berharap bahwa langkah ini bisa membawa perubahan yang nyata dan membuat layanan kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Banyumas semakin baik.

Apa Pendapat Anda? Bagaimana pengalaman Anda dalam mengakses layanan kesehatan dasar di Kabupaten Banyumas? Apakah Anda merasa layanan kesehatan dasar yang diberikan sudah memenuhi standar?

Yuk, kita diskusikan! Mungkin ada cerita atau masukan yang bisa membantu Pemerintah Daerah dalam memperbaiki layanan kesehatan.